



Good Governance: Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintahan Desa Di Kecamatan Binuang

Umi Umairah Suhardi¹, Fitriani Sari Handayani Razak², Nurhaerani Tenriwaru³
Zainuddin Losi⁴

¹²³⁴ *Department of Political Science, Universitas Sulawesi Barat, Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412 Indonesia*

Abstrak

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam rangka pembangunan suatu bangsa. Begitu pula dalam pembangunan desa. Pengembangan Kapasitas SDM aparatur desa dalam rangka mewujudkan Good Governance, harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola yang baik pula. Untuk menilai kemampuan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa, dapat dilakukan melalui pemetaan terhadap perangkat desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memahami kapasitas perangkat desa dalam mengelola pemerintahan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Binuang untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pada aparatur desa batetangga memberikan pengaruh pada kinerja aparat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada pemerintahan, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan seorang aparat maka cara berpikir mereka akan semakin baik pula. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparat desa yakni melakukan analisis kebutuhan, menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas untuk menghadapi perkembangan teknologi, melaksanakan evaluasi pada setiap pelatihan, membuka ruang partisipasi publik, dan perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelatihan secara berkelanjutan

Keywords:

Peningkatan Kapasitas SDM; Good Governance; Pemerintahan Desa

Abstract

Human resources are the main asset in the development of a nation. Likewise in village development. Development of the capacity of village apparatus human resources in order to realize Good Governance, must start from a good village planning process, and be followed by good governance. To assess the ability of village officials in running village government, it can be done through mapping of the village apparatus. This study uses a qualitative approach and method, which is descriptive. The purpose of writing this article is to understand the capacity of village officials in managing government, identify obstacles faced, and evaluate efforts that have been and will be made by the Binuang District Government to improve the ability of village officials in carrying out village government duties. The results of the study indicate that the level of education of the Batetangga village apparatus has an influence on the performance of village officials in carrying out their duties and functions in government, because the higher the level of education of an official, the better their

Kata Kunci: Human Resources Capacity Building; Good governance; Village Administration

way of thinking will be. Efforts that can be made to improve the capacity of village apparatus human resources are conducting needs analysis, organizing technical guidance training in improving quality to face technological developments, conducting evaluations at each training, opening up space for public participation, and the need for coordination between the Central Government and the Regional Government to conduct training on an ongoing basis

1. Pendahuluan

Desa merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan negara manapun, yang mana dipercaya bahwa desa lebih dahulu berdiri dibandingkan negara, sehingga bisa dikatakan bahwa desa merupakan miniatur dari sistem pemerintahan suatu negara yang mana desa memilih sendiri kepala desanya (dalam hal ini merupakan representatif pemilihan eksekutif) dan Badan Perwakilan Desa/BPD (representatif dari pemilihan legislatif di tingkat desa). Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki hak istimewa dalam mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk urusan masyarakatnya. Adanya penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya No.43 Tahun 2014, maka menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakatnya. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan juga unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi suatu syarat supaya pelaksanaan UU Desa itu sendiri dapat berjalan secara optimal (Gowon 2021).

Menurut (Satria et al. 2021) Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukkan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat (Damayanti, 2014).

Program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan merestrukturisasi dan realokasi Aparat Sipil Negara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, menyempurnakan sistem rekrutmen Aparat Sipil Negara yang lebih transparan, akuntabel, objektif dan kompetitif, merumuskan kompetensi jabatan Aparat Sipil Negara, sistem penilaian kinerja pegawai, dan sistem pembangunan atau pengembangan kualitas karir pegawai. Menyempurnakan sistem pendidikan dan latihan, memperbaiki komposisi jumlah dan mutu pegawai, menyusun sistem penggajian yang adil dan transparan, pemberian penghargaan dan sanksi serta memantapkan netralitas Aparat Sipil Negara (Labola 2019).

Davis dalam Arrosidi (2019), menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuantujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadap pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. Selanjutnya, menurut Handayani dkk (2020), bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum. Fajarwati (2019) juga berpendapat bahwa perlunya pengembangan kapasitas SDM aparatur dengan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin mengenai tertib administrasi dalam pelayanan di desa dan kemampuan memahami hal teknis penunjang (mengoperasikan komputer). Hal ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang baik. (Yunus and Sani 2017).

Pengembangan SDM juga mengenal pendekatan perencanaan untuk mendorong pengembangan diri dengan dukungan dan panduan memadai dari dalam organisasi. Meningkatnya manfaat mengenai kemampuan dipekerjakan di dalam organisasi seharusnya merupakan pertimbangan utama kebijakan pengembangan SDM (Arrosidi and Nurani 2019). Pendapat tersebut menunjukkan antara lain bahwa pengembangan SDM bertujuan menciptakan organisasi belajar (*learning organization*) serta pengembangan lingkungan. *Learning organization* dimaksudkan bahwa suatu organisasi yang anggota-anggotanya mampu mengembangkan kapasitasnya secara berkelanjutan dalam mewujudkan hasil yang optimal atau dengan kata lain bahwa organisasi belajar merupakan organisasi yang dengan cepat dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan eksternalnya, tetapi juga kuat integrasi internalnya (Ridho, Mardiana, and Watora 2017).

Kecepatan menyesuaikan diri dan peka terhadap lingkungan merupakan ciri SDM yang mempunyai kompetensi, wawasan, dan motivasi yang berkesinambungan. Sedangkan kekuatan integrasi internalnya adalah organisasi yang memiliki individu-individu dalam tim yang produktif dan berkualitas tinggi. Artinya, bahwa strategi pengembangan sumber daya aparatur desa merupakan cara yang dilakukan untuk mengembangkan aparatur desa melalui proses pendidikan dan latihan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang mempelajari pengetahuan konseptual, teoritis, dan aplikatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Definisi ini memberikan penegasan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, butuh aparatur desa yang profesional dalam menjalankan tugas.

Permasalahan yang dihadapi pemerintahan Desa di Desa Batetangnga masih rendahnya kapasitas Aparatur Daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih terbatasnya ketersediaan Aparatur Desa baik dari segi profesionalitas dan terbatasnya kesejahteraan aparatur desa. Serta tidak profesionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan. Tidak ada kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsive terhadap permasalahan yang berkembang. Selain itu, belum terbangunnya system dan regulasi yang memadai didalam perekrutan dan pola karier aparatur desa menyebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia berkualitas dalam pemerintahan desa. Dengan memperhatikan permasalahan Sumber Daya Manusia, maka akan dapat diketahui bahwa upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan karir dan

profesionalitas aparatur desa, oleh sebab itu pemerintah desa mempunyai tanggungjawab untuk melakukan upaya-upaya terobosan yang lebih kongkrit dan komperhensif guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Yang dimana setiap pemimpin dihadapkan pada masalah bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi/unit kerja melalui pegawai yang dipimpinnya. Kalau setiap pemimpin bersama bawahannya mampu menampilkan kinerja yang baik sesuai dengan tugas masing-masing, maka kinerja organisasi akan tercapai. Pemimpin dan bawahan yang menjadi pelaku dalam organisasi merupakan kunci penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menciptakan aparatur yang professional serta pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Selain itu tentu yang lebih penting adalah pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa lebih intensif dan berkesinambungan melalui peningkatan pendidikan formal aparatur, pelaksanaan pendidikan dan latihan, dan perbaikan fungsi manajemen Sumber Daya. Sadar akan peranan dan kedudukan aparatur pemerintah desa yang sangat strategis dan pemberian pelayanan publik, maka upaya pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa haruslah ditempatkan sebagai prioritas utama karena akan menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Semua penguatan aparatur sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai pembangunan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (Darmi and Suwitri 2017).

Dari hasil pengamatan peneliti selama ini pada penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terdapat fenomena dimana aparatur pemerintahan belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya Sumber Daya Aparatur Desa yang handal sehingga masih terdapat pegawai yang terlambat masuk kantor, pulang tidak tepat waktu, kemampuan melaksanakan tugas tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, semangat kerja menurun dalam hal ini kurang produktif, kurang kreatif dan kurang inovatif dan bahkan adanya pegawai yang kurang menguasai teknologi yang berkaitan dengan penyelesaian tupoksi. Fokus pada tulisan ini adalah untuk mengetahui beberapa hal dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur desa dan upaya apa yang akan maupun telah dilakukan pemerintah dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan good governance.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek tertentu (Sugiyono, 2016). Dalam hal ini fenomena yang digambarkan terkait peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (desk research), yakni penulis mengumpulkan data-data dan informasi dari buku-buku, internet, dan jurnal. Penelitian ini juga melakukan penelaahan data dan informasi dari satu daerah yaitu di Kecamatan Binuang

Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dilakukan karena belum ada yang mengamati dan mencatat terkait aparatur di desa tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Minimnya sumber akses informasi dan komunikasi terkait pengelolaan manajemen desa disebabkan karena sebagian besar aparatur desa tidak mengetahui dan memahami regulasi. Hal ini yang menyebabkan tugas dan tanggung jawab mereka tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

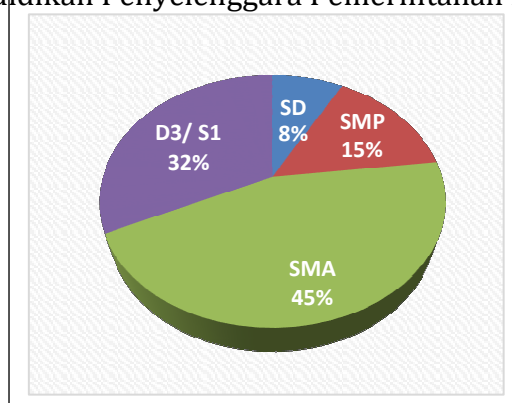
Trace (1994), mengklasifikasi fokus wilayah pada peningkatan SDM sebagai berikut :

Activity Area (focus)	Label
<i>Learning directed toward the present job of the learner</i>	<i>Training</i>
<i>Learning directed toward a future identified job the learner</i>	<i>Education</i>
<i>Learning that is not job -related</i>	<i>Development</i>

Sumber: (Darmi and Suwitri 2017)

Berdasarkan dari aktifitas peningkatan sumber daya manusia di atas, dapat dikemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia secara umum adalah belajar (learn) yaitu pembelajaran yang mengarah langsung pada pekerjaan individu tersebut. Misalnya, (training) pembelajaran yang mengarah langsung pada pekerjaan untuk masa depan individu tersebut (education) dan pembelajaran yang tidak berhubungan dengan pekerjaan (developmen) dan disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia secara umum berupa pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Gambar 1. Tingkat Pendidikan Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kecamatan Binuang



Sumber : Data diolah (2024)

Gambar 1 menunjukkan tingkat pendidikan aparatur desa. Kemampuan aparatur desa di Kecamatan Binuang dilihat dari tingkat pendidikan. Berdasarkan data dilapangan terdapat 32% berpendidikan Sarjana, 45% berpendidikan SMA, 15% berpendidikan SMP, dan 8% berpendidikan SD. Adanya beberapa perangkat desa dengan tingkat pendidikannya lulusan SD, memperlihatkan bahwa kapasitas SDM penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang pada tingkat pendidikan aparatur desa belum memadai. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip – prinsip good governance. Pentingnya upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, pemerintah pusat memiliki peranan penting dalam membuat suatu kebijakan untuk mengembangkan kapasitas pemerintahan desa. Salah satu hal yang menghambat kinerja pelayanan publik disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang terhadap bidang pelayanan.

Sistem pelayanan yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat sebagai pelaksana yang mampu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa mampu melayani dengan baik. Namun, banyak kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang dalam proses pelayanan antara lain banyaknya keluhan masyarakat dengan cara pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa mulai dari system pelayanan yang sangat lambat, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih mengutamakan teman sejawat, saudara, atau karena faktor tertentu. Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja pelayanan, sehingga target yang dicapai dalam kinerja pelayanan publik kurang maksimal. Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pengetahuan penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.

Upaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa Batetangnga

Upaya peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Sumber daya manusia khususnya aparatur desa merupakan hal yang memerlukan penanganan serius untuk mengembangkannya menjadi individu yang unggul, berkualitas, dan profesional. Mencermati pola yang dilakukan selama ini oleh penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya aparatur desa belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dan inovasi untuk membekali aparatur desa menjadi individu yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing aparatur desa, maka diperlukan upaya pengembangannya yang tepat, efektif, dan efisien.

Pemerintah desa melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM aparat melalui pelatihan dengan melakukan strategi peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah Desa. Tidak hanya itu, pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan agar sesuai dengan rencana semula dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari kegiatan pelatihan yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah desa. Tentunya, ini akan mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang optimal. (Satria et al. 2021), Mengatakan bahwa pengembangan model pelatihan Kapasitas Aparatur Desa adalah suatu komponen yang memiliki keterkaitan dengan komponen lain, sehingga semakin sempurna setiap proses dilakukan semakin baik hasil yang diperoleh.

Pengembangan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali melalui bimbingan teknis pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan lembaga desa dalam melaksanakan program desa. Namun, Pelaksanaan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang selama ini hanya sebatas bimbingan secara umum dan belum termasuk ke dalam pendampingan secara teknis pelaksanaannya, sehingga belum mampu membantu menyelesaikan permasalahan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kemudian, Bimbingan teknis ini tidak disertai dengan adanya semangat dari aparatur desa, yang mana antusiasme aparatur desa sangat kurang. Kebanyakan aparatur desa mengikuti bimbingan teknis hanya sekedar formalitas saja. Padahal, pengembangan sumber daya aparatur desa merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur desa di Kecamatan Binuang.

Peningkatan kapasitas SDM aparatur Desa di Kecamatan Binuang dilaksanakan melalui bimbingan teknis. Tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis ini adalah untuk mengembangkan kapasitas SDM aparatur desa agar mampu menciptakan pemerintahan desa yang efektif. Namun, peningkatan kapasitas SDM aparatur desa di Kecamatan Binuang melalui bimbingan teknis belum berjalan sebagaimana mestinya. Bimbingan teknis yang dilaksanakan hanya sebatas bimbingan secara umum saja dan belum termasuk dalam pendampingan teknis pelaksanaannya. Padahal peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pemberian pelatihan (training) atau bimbingan teknis itu harusnya mencakup peningkatan pengetahuan, ketrampilan, potensi, kepribadian, modal, dan etos kerja dalam mendukung terciptanya administrasi desa yang tertib. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa harus dilaksanakan supaya tercapainya tujuan organisasi (Fajarwati 2019).

Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui bimbingan teknis penting dilaksanakan, karena skill karyawan mengenai pengetahuan sesuai jabatan, tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dapat berkembang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alam (2017), bahwa bimbingan teknis yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu bertujuan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dibutuhkan aparatur desa yang memiliki profesionalisme dalam bekerja. Selain itu, bimbingan teknis ini akan meningkatkan kemampuan karyawan disertai dengan adanya peningkatan kedisiplinan kerja yang mampu

mewujudkan individu yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan terkait kepentingan organisasi.

Bimbingan teknis yang ditujukan kepada aparatur desa menjadi wadah bagi aparatur untuk belajar mengatasi berbagai permasalahan selama melaksanakan pekerjaannya agar produktivitas kerjanya meningkat. Organisasi perlu mengevaluasi produktivitas dan bimbingan teknis. Keseluruhan karyawan perlu dibimbing sampai akhir. Melalui bimbingan teknis ini, ketrampilan dan kemampuan karyawan dapat ditingkatkan. Karyawan yang memiliki ketrampilan dan kemampuan yang bagus serta adanya motivasi kerja sangat menentukan produktivitas kerjanya (Bariqi 2018).

Tujuan pemberdayaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk semangat dalam bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi dan melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini bersandar pada pendapat Kapoh dalam Satria, (2021) mengatakan bahwa pemberdayaan aparatur adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui pengadaan, karier, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur negara disertai tugas dalam suatu jabatan. Berdasarkan hal tersebut, ada 5 (lima) hal yang menjadi fokus dalam pemberdayaan yakni pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian, dan pengelolaan administrasi. Ada tiga jenjang peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa. (Herdiana 2013) menjelaskan tiga jenjang itu adalah sistem/kebijakan, entitas/organisasi, dan individu. Melalui sebuah sistem yang dibuat, pemerintah daerah dapat menyusun kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung dan membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan. Kedua melalui tingkatan organisasi. Pemerintah daerah dapat menyusun struktur kelembagaan, proses-proses pengambilan keputusannya, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, relasi-relasi dan jaringan antar-lembaga. Jenjang individu dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan administrasi dan pelayanan, penanaman nilai-nilai etika dan motivasi belajar dan bekerja, sikap, kualifikasi pendidikan, dan pengetahuan.

Keberadaan SDM aparatur menjadi penting dalam hal menyelesaikan keseluruhan kepentingan organisasi, khususnya pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh karena itu, SDM aparatur mutlak untuk dikelola supaya kualitasnya bisa meningkat sesuai bidang pekerjaannya. (Salim, Rivai, and Mufti 2017) Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa tidak hanya berhenti pada bimbingan teknis saja, melainkan juga ada pelatihan terkait teknologi dan informasi. Pelatihan ini sebagai wujud kegiatan pengembangan kapasitas SDM dalam hal kemampuan aparatur desa di bidang teknologi dan informasi sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya menjadi kurang optimal dikarenakan pada pelatihan ini tidak adanya tahapan monitoring dan evaluasi. Disamping itu tingkat ketertarikan aparatur terhadap informasi teknologi sangat rendah, sehingga pelatihan tersebut tidak berdampak pada pengembangan kemampuan dalam bidang teknologi. Karena itu, sampai saat ini kemampuan IT penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang masih menjadi masalah utama pengoperasionalan teknologi, sehingga para aparatur kurang

maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik, utamanya dalam pelayanan administrasi.

Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM aparatur desa melalui pelatihan IT tidak didasari dengan adanya softskill dari aparatur desa itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak efisien mengingat IT ini diperlukan dalam menyediakan data informasi desa ke tingkat kecamatan Binuang dan kabupaten Polewali Mandar. Penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang yang notabene tidak memiliki ketertarikan dalam menggunakan IT. Disisi lain, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini justru tidak menguntungkan bagi beberapa desa di Kecamatan Binuang, seperti yang terjadi pada desa Kaleok dan desa Amola.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa teknologi informasi (IT) saat ini telah berkembang pesat sampai ke pelosok desa. IT tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat desa, sehingga pemerintah desa menggunakan IT untuk mendukung keefektifan layanan publik (Edy and Suhartono 2021). Selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan, IT dapat berfungsi sebagai media pengolahan informasi dalam merancang pembangunan, mengambil keputusan, memonitoring, memudahkan dalam menyusun perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan (Mayowan 2016). Keberhasilan pemanfaatan TIK perlu ditunjang sarana dan prasarana yang baik termasuk sumber daya manusia yang profesional. Di samping itu, perlu adanya pengembangan skill karyawan di lingkup pemerintah desa agar memiliki skill sesuai yang diperlukan. (Nuradhawati , 2020).

Pengembangan kapasitas SDM tidak hanya ditujukan pada staff aparatur desa saja melainkan untuk seluruh elemen pemerintah desa termasuk Kepala Desa, utamanya dalam hal pengembangan kemampuan berkomunikasi terhadap staff aparat desa untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena lingkungan yang demikian dapat terwujud jika terdapat pemimpin yang mampu memahami, melindungi, mengarahkan bawahannya dalam melayani masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan pekerjaan secara profesional sesuai tugas pokoknya dan lebih

mementingkan kepentingan masyarakat secara umum. Kurangnya kemampuan komunikasi Kepala Desa dengan aparatur-aparaturanya juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengembangan kapasitas SDM aparatur. Pada dasarnya komunikasi yang dilakukan kepala desa melibatkan seluruh elemen pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan proses pembangunan dan merupakan langkah maju untuk meningkatkan kemakmuran desa dan kesejahteraan masyarakat. Melalui komunikasi akan terjadi interaksi yang dapat menyamakan persepsi, sehingga terbangunnya kerjasama antara pimpinan dengan perangkat desa (Rodiyah, Sukmana, and Choiriyah 2021).

SDM penyelenggara pemerintahan desa di Kecamatan Binuang menjadi prioritas utama pemerintah desa yang membutuhkan upaya pengembangan kapasitas agar tercipta SDM yang berkualitas dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Meninjau pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan IT yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar, dapat dikatakan bahwa pengembangan kapasitas SDM aparatur desa belum dilaksanakan secara optimal, sehingga diperlukan kerjasama dengan

pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk menyusun ide baru dalam melaksanakan pembekalan aparatur desa yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kendala dalam Peningkatan Kapasitas SDM aparatur Desa

Hambatan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa selain minimnya pengetahuan, yaitu beberapa aparatur desa memiliki masa kerja yang sudah terlalu lama dan berusia lanjut. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa jenuh dalam bekerja dan menurunnya semangat dan motivasi untuk belajar. Di samping itu tingkat kesejahteraan aparatur Desa di Kecamatan Binuang masih belum memadai. Salah satunya disebabkan karena penghasilan yang kurang mencukupi. Tingkat kesejahteraan aparatur desa yang belum memadai menyebabkan aparatur desa cenderung untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara bertani dan kurangnya kesadaran dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai aparatur desa.

(Mangindaan and Manossoh 2018) berpendapat bahwa dengan tingkat pendidikan dan terbatasnya sarana yang dimiliki tentu saja membuat aparat desa belum mampu menggunakan Teknologi dengan lancar, hal ini tentu akan menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja aparat secara keseluruhan. Penggunaan Teknologi wajib bagi desa-desa, karena pelaporan harus dilakukan secara online. Pemanfaatan teknologi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan Teknologi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. (Atika and Ati 2018), mengatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi di pemerintahan desa, untuk membantu aparatur desa agar dalam melakukan pekerjaan lebih maksimal.

4. Kesimpulan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur Desa Batetangnga yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan IT belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan bimbingan teknis belum optimal, karena bimbingan teknis yang dilaksanakan tidak termasuk ke dalam pendampingan secara teknis pelaksanaannya, sehingga aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan. Untuk pelaksanaan pelatihan IT juga belum optimal, karena penguasaan terhadap teknologi belum merata, kemudian dalam pelaksanaannya juga tidak disertai adanya monitoring dan evaluasi. Masih melemahnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Perlunya mengadakan pelatihan rutin dan sosialisasi, diharapkan pada perekrutan aparatur desa agar lebih mengutamakan pendidikannya, adanya pengawasan kinerja SDM untuk meningkatkan kualitas aparatur, SDM diberi penguasaan terhadap teknologi terbaru sesuai dengan kemajuan jaman, meningkatkan koordinasi dan kinerja aparatur dengan cara bekerjasama dengan pemerintah di atasnya, peningkatan pelayanan aparatur desa dengan mengadakan pelatihan kepemimpinan, dan yang terakhir peningkatan kapasitas SDM Kepala

Desa juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kemampuan berkomunikasi terhadap staff aparat desa untuk menciptakan suasana iklim kerja yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Daftar Pustaka

- Arrosidi, M K, and F Nurani. 2019. "Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa." Blog.Ub.Ac.Id. <http://blog.ub.ac.id/kemalrosyid/files/2019/12/Upaya-Pemerintah-dalam-Meningkatan-Kualitas-Sumber-Daya-Aparatur-Desa-.pdf>.
- Atika, Nurul, and Nurul Umi Ati. 2018. "Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Dalam Improvement of the Village Apparatus Performance in Carrying Out Administration Assignments Through." *Civil Service* 12(1): 33–39.
- Bariqi, Muhammad Darari. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm)." *Jurnal Dinamika Pendidikan* 11(2): 153.
- Darmi, Titi, and Sri Suwitri. 2017. "Strengthening the Capacity of Human Resources Apparatus in the Implementation of New Autonomous Regions." *European Journal of Social Sciences* 55(4): 427–38. <http://www.europeanjournalofsocialsciences.com/>.
- Edy, Safrin, and Rizki Mustika Suhartono. 2021. "Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa Terkait Rancangan Perdes Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." 01(02): 86–92.
- Fajarwati, Neri. 2019. "Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 22(2): 219–34.
- Gowon, M. 2021. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan" *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 201(Icosiams 2021). <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/16111%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/download/16111/12337>.
- Handayani, Fitri, Erfina Erfina, and Pratiwi Ramlan. 2020. "Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8(3): 198–206.
- Herdiana. 2013. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: Good Governance Sebagai Pemediiasi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Labola, Yostan A. 2019. "Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Bakat Dan Ketahanan Dalam Organisasi." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 7(1).
- Mangindaan, Joanne V., and Hendrik Manossoh. 2018. "Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe." *Jurnal Lppm Bidang EkoSosBudKum* 4(1): 35–49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/24105>.
- Mayowan, Yuniadi. 2016. "PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI DESA (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)." *Profit* 10(01): 14–23.
- Nuradhawati, Rira. 2020. "Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Era 4.0." *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma* 1(2): 104–17.
- Ridho, Achmad, Siti Mardiana, and Ainun Watora. 2017. "Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Sdm Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Menunjang Penerapan E-Government Di Indonesia." *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Indusri 4.0"* 0(0): 993–1017. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3531>.
- Rodiyah, Isnaini, Hendra Sukmana, and Ilmi Usrotin Choiriyah. 2021. "Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penyelenggraan Pemerintahan Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo." *Publisia*: